

PEMAHAMAN SAK EMKM, *DIGITAL BUSINESS*, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KINERJA DENGAN KUALITAS SDM SEBAGAI PEMODERASI STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL

Sri Ayem¹⁾, Naresha Hanun²⁾

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa^{1,2)}

Email : sri.ayem@ustjogja.ac.id¹⁾, nare017082.mhs@ustjogja.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), bisnis digital, dan insentif perpajakan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul, dengan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya adopsi teknologi digital, kepatuhan pelaporan keuangan yang belum optimal, dan terbatasnya pemahaman insentif perpajakan pada kalangan pelaku usaha. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman SAK EMKM dan insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, sedangkan bisnis digital berpengaruh negatif. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia secara signifikan memoderasi hubungan ketiga variabel bebas tersebut dengan kinerja UMKM. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi, literasi digital, dan sosialisasi kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Keywords: *UMKM, SAK EMKM, Digital Business, Insentif Pajak, Kinerja, Kualitas SDM*

Abstract

This study aims to analyze the effect of understanding Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM), digital business, and tax incentives on the performance of MSMEs in Bantul Regency, with human resource quality as a moderating variable. The background of the study highlights low digital technology adoption, suboptimal financial reporting compliance, and limited understanding of tax incentives among business actors. A quantitative approach was applied by distributing questionnaires to 100 MSME actors selected through purposive sampling. The findings indicate that SAK EMKM understanding and tax incentives have a positive effect on MSME performance, while digital business has a negative effect. Furthermore, human resource quality significantly moderates the relationship between the three independent variables and MSME performance. The implications of this study emphasize the importance of improving human resources through accounting training, digital literacy, and fiscal policy socialization to support the sustainable and competitive growth of MSMEs.

Keywords: *UMKM, SAK EMKM, Digital Business, Tax Incentives, Performance, HR Quality*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, baik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, maupun sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui perannya dalam meningkatkan Produk Domestik

Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja. Menurut Ayem et al. (2024), UMKM memberikan sumbangsih sebesar 60,3% terhadap total PDB Indonesia serta menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja nasional. Oleh sebab itu, penguatan peran UMKM perlu diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, terutama dalam hal pemahaman pencatatan akuntansi berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), digitalisasi usaha, serta pemanfaatan insentif pajak secara optimal.

Penerapan SAK EMKM, digitalisasi bisnis, dan insentif pajak merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja UMKM di Indonesia. SAK EMKM memberikan panduan akuntansi yang lebih sederhana, sehingga UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan terpercaya (Kholifah, 2023). Laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kredibilitas UMKM di mata investor dan lembaga keuangan, serta memudahkan akses terhadap pembiayaan. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi merupakan hal yang penting dalam memperkuat daya saing UMKM.

Pada tahun 2023, terdapat sedikitnya 92.825 UMKM yang aktif di Kabupaten Bantul. Namun, sebagian besar dari mereka masih melakukan transaksi secara konvensional melalui toko fisik dan pembayaran tunai. Saat ini, strategi pemasaran telah banyak beralih ke ranah digital melalui marketplace dan media sosial. Dalam konteks digitalisasi, penggunaan e-commerce dan sistem informasi akuntansi dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan e-commerce secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan literasi digital (Ayem et al., 2024). Contohnya, banyak UMKM di Bantul yang bergerak di bidang kerajinan dan industri rumahan masih menghadapi kendala dalam mengakses permodalan dan meningkatkan kemampuan manajerial. Beberapa pelaku usaha mulai memasarkan produk mereka, seperti kuliner dan fashion, melalui platform seperti Facebook, Instagram, Shopee, dan Tokopedia, tetapi belum sepenuhnya maksimal.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak yang diberikan, seperti tarif PPh Final yang lebih rendah, belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM, termasuk yang terdaftar di Dinas UKM Kabupaten Bantul. Penelitian Ayem et al. (2024), menyatakan bahwa insentif pajak merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meringankan beban usaha. Untuk memaksimalkannya, diperlukan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan, perpajakan, dan strategi bisnis secara efektif. Dengan demikian, insentif pajak dapat meringankan beban usaha dan mendukung keberlanjutan UMKM (Agung et al., 2023).

Penelitian oleh Padli (2022) menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM secara signifikan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM, yang berdampak pada kemudahan akses pembiayaan dan peningkatan kepercayaan investor. Selain itu, studi Ayem & Wahidah (2021) mengungkapkan bahwa digitalisasi bisnis mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar UMKM, sehingga meningkatkan daya saing di era digital. Kedua penelitian ini juga menegaskan pentingnya insentif pajak sebagai pendukung perkembangan usaha. Ketiga aspek ini pemahaman akuntansi, digitalisasi, dan insentif pajak secara bersama-sama berkontribusi terhadap daya saing dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada studi sebelumnya oleh Ayem et al. (2024) yang mengkaji pengaruh sistem informasi akuntansi, e-commerce, insentif pajak, dan bantuan stimulus

pemerintah terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini memiliki dua perbedaan utama: pertama, peneliti menambahkan variabel pemahaman SAK EMKM dan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderasi; kedua, penelitian ini secara khusus dilakukan di Kabupaten Bantul, tidak hanya di wilayah Yogyakarta secara umum.

2. TINJAUAN TEORI

Teori stakeholder

Teori *stakeholder* diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada kemampuannya dalam memenuhi kepentingan seluruh pihak yang terlibat atau berkepentingan (*stakeholders*). Para *stakeholder* ini mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, hingga pemerintah.

Prinsip teori ini adalah organisasi harus mengelola hubungan dengan para *stakeholder* secara adil. Jika kebutuhan atau kepentingan mereka diabaikan, dapat timbul konflik yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan perspektif berbagai *stakeholder* menjadi penting untuk menciptakan nilai jangka panjang.

Dalam penelitian ini, teori *stakeholder* digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dan praktik yang diterapkan, seperti penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), digitalisasi bisnis, serta pemberian insentif pajak, dapat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal ini didukung oleh penelitian Oktayani et al. (2024), yang menemukan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Dengan demikian, teori *stakeholder* relevan dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan dan respons kinerja pelaku UMKM.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari perusahaan besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. UMKM dipandang sebagai fondasi utama perekonomian di banyak negara, termasuk negara maju dan berkembang. Perannya sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mendorong inovasi, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional (Essiet & Paago, 2024).

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia ditentukan berdasarkan besaran kekayaan bersih dan total penjualan tahunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan regulasi tersebut, UMKM terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. **Usaha Mikro**, yakni usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta omzet tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000,00.
2. **Usaha Kecil**, yaitu usaha dengan kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 dan omzet tahunan berkisar antara Rp300.000.000,00 sampai Rp2.500.000.000,00.
3. **Usaha Menengah**, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 dengan omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 dan tidak melebihi Rp50.000.000.000,00.

UMKM merupakan sektor penting yang tidak hanya menopang ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendorong transformasi sektor informal menuju sektor formal yang lebih tertata. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan yang berpihak pada pengembangan UMKM, termasuk dalam aspek pelaporan keuangan, sangat krusial guna mendukung keberlanjutan dan peningkatan daya saing sektor ini.

SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan pedoman akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, seperti UMKM. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, serta mudah dipahami. Diharapkan, penerapan SAK EMKM mampu meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, (Yolanda et al., 2024).

SAK EMKM menekankan pentingnya pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik usaha dan kekayaan entitas usaha, serta mengatur penyusunan laporan keuangan sederhana yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Tidak seperti entitas besar, UMKM tidak diwajibkan menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020).

Meskipun telah dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM, dalam praktiknya masih banyak yang belum mampu menerapkan SAK EMKM secara optimal. Berdasarkan hasil kajian pustaka, sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman akuntansi dari pelaku UMKM, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang akuntansi, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh pihak terkait. Kondisi ini menyebabkan UMKM masih mengandalkan metode pencatatan sederhana yang belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Yolanda et al., 2024).

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh Yolanda et al. (2024), mayoritas pelaku UMKM di Indonesia belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Ketidaksihesuaian ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap format dan isi laporan keuangan yang sesuai standar. Selain itu, metode pencatatan yang digunakan masih bersifat sederhana dan belum memisahkan transaksi bisnis dengan transaksi pribadi. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga akuntansi, dan pelaku usaha dalam menyediakan pelatihan serta pendampingan guna meningkatkan kemampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan andal.

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam operasional bisnisnya. Dalam konteks UMKM, penerapan SAK EMKM berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Stakeholder seperti investor, kreditur, dan pemerintah memerlukan laporan keuangan yang jelas dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja UMKM.

Menurut Kholifah (2023), SAK EMKM berdampak positif pada kinerja UMKM dengan mempermudah evaluasi, pengendalian, dan pelaporan akuntansi, sehingga laporan keuangan lebih cepat, terstruktur, dan transparan. Hal ini membantu UMKM mengidentifikasi kinerja operasional dengan lebih baik. Dengan laporan yang lebih akurat, UMKM dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif dan efisien (Padli, 2022). Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan terkait penerapan SAK EMKM terhadap kinerja UMKM.

Digital Business

Keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Dalam konteks ini, ketahanan dan fleksibilitas menjadi dua aspek penting yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan yang dinamis. Transformasi digital menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing UMKM di era globalisasi. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara bisnis dijalankan, termasuk pada sektor UMKM yang sebelumnya kurang tersentuh oleh teknologi.

Teknologi digital memungkinkan UMKM untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar seperti menggunakan platform e-commerce dan media sosial (Kumala, 2024). Dengan memanfaatkan teknologi ini, UMKM tidak hanya dapat menjangkau konsumen secara lebih luas, tetapi juga dapat mengelola operasional secara lebih efisien, mulai dari pemasaran hingga manajemen rantai pasok. Selain itu, digitalisasi membuka peluang kolaborasi dan integrasi dengan ekosistem bisnis yang lebih besar.

Berdasarkan hasil riset Muttalib, (2022) menunjukkan bahwa UMKM yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan, serta mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional, cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang terarah dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara inovasi, teknologi, dan dukungan sumber daya manusia adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di era digital. Dukungan sumber daya manusia, dalam hal ini keterampilan digital dan adaptabilitas pelaku UMKM, menjadi fondasi penting agar transformasi digital dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang berkelanjutan.

Berdasarkan teori stakeholder bahwa implementasi digital business memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi lebih efektif dengan stakeholder. Misalnya, teknologi digital dapat meningkatkan pelayanan dan hubungan dengan pemasok. Kepuasan stakeholder yang meningkat dari interaksi yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh positif signifikan Digital Marketing terhadap kinerja UMKM.

Insentif Pajak

Insentif perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk mendorong keberlanjutan dan peningkatan kinerja pelaku usaha, termasuk di sektor UMKM (Essiet & Paago, 2024). Kebijakan ini berfungsi sebagai bentuk dukungan fiskal yang dapat membantu UMKM menghadapi tantangan ekonomi dengan cara mengurangi beban pajak, sehingga pelaku usaha dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya. Dalam konteks ini, insentif pajak tidak hanya berperan sebagai stimulus jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha (Essiet & Paago, 2024).

Pemerintah menyadari bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Untuk mendukung pertumbuhannya, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak, seperti pembebasan pajak, tunjangan investasi, keringanan atas kerugian usaha, dan penurunan tarif pajak bagi usaha kecil (Essiet & Paago, 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan UMKM agar mereka bisa lebih efisien dan memperluas usahanya.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, yang tercermin dari penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32%. Untuk merespons tekanan tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan darurat, termasuk kebijakan insentif pajak bagi UMKM yang diberlakukan sejak Maret hingga Desember 2020. Kebijakan tersebut mencakup pembebasan pajak bagi pelaku usaha kecil (Yuli Agustina et al., 2021). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan keringanan beban fiskal, sehingga pelaku UMKM dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara optimal.

Sebagai lanjutan dari reformasi perpajakan, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7 Tahun 2021), yang menjadi tonggak penting dalam menyederhanakan sistem pajak dan mendukung pelaku usaha kecil. Dalam UU tersebut, salah satu perubahan utama adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1% menjadi 0,5% sejak tahun 2018, serta pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta yang mulai diberlakukan pada tahun 2022. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan memberikan insentif nyata bagi pertumbuhan sektor UMKM secara berkelanjutan.

Pemberian insentif pajak juga selaras dengan teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (1984), yang menyatakan bahwa setiap organisasi memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh aktivitasnya, termasuk pemilik usaha, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, kebijakan insentif pajak tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder lainnya. Dengan adanya insentif pajak, UMKM dapat mengurangi beban biaya operasional dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan usaha, seperti peningkatan kualitas SDM, investasi teknologi, dan perluasan pasar. Hal ini secara tidak langsung mendukung peningkatan kesejahteraan karyawan, keberlanjutan usaha, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, insentif pajak dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan kepentingan antar stakeholder di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat (Ayem et al., 2024). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh positif signifikan Insentif Pajak terhadap kinerja UMKM

Sumber Daya Manusia

Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi karena berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Meskipun suatu organisasi memiliki peralatan yang canggih, tujuan organisasi tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif dari sumber daya manusia di dalamnya. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam mendorong kemajuan suatu usaha secara menyeluruh.

Menurut Nabawi & Basuki (2022), peningkatan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha berawal dari meningkatnya pemahaman mereka terhadap manfaat usaha yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pemahaman dan keterampilan, memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Teori stakeholder menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik dapat memperkuat pengaruh positif penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) terhadap kinerja suatu entitas usaha. Kualitas SDM yang memadai berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan

ketentuan SAK EMKM. Dengan kata lain, pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan atau pemahaman yang lebih tinggi cenderung lebih mampu memahami pentingnya pelaporan keuangan yang sesuai standar. Penelitian yang dilakukan oleh Nabawi dan Basuki (2022) juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kinerja UMKM. Dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif, pelaku UMKM dituntut untuk memiliki strategi yang adaptif dan mampu memanfaatkan penerapan SAK EMKM secara optimal guna mendorong kinerja usahanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4 : Sumber daya manusia memperkuat hubungan pemahaman SAK EMKM terhadap kinerja UMKM.

Penguatan terhadap peran SDM dalam digitalisasi bisnis juga selaras dengan teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (1984), yang menyatakan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang terdampak oleh aktivitasnya, termasuk pemilik usaha, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Penerapan digital bisnis yang berhasil tidak hanya meningkatkan kinerja internal UMKM, tetapi juga memberikan manfaat bagi para stakeholder melalui layanan yang lebih cepat, akses pasar yang lebih luas, dan nilai tambah produk. Namun, semua manfaat tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas pelaku usaha dalam menggunakan teknologi digital secara efektif.

Secara logika, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam suatu UMKM, semakin besar kemampuan usaha tersebut dalam memanfaatkan teknologi digital dengan optimal. SDM yang berkualitas akan lebih mudah mengadopsi perubahan teknologi, menjalankan, mengelola teknologi secara efektif. Oleh karena itu, kualitas SDM berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara digitalisasi bisnis dan kinerja UMKM. Dengan kata lain, penerapan digital bisnis akan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap kinerja UMKM jika didukung oleh SDM yang berkualitas. Berdasarkan uraian ini, peneliti merumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5 : Sumber daya manusia memperkuat hubungan digital bisnis terhadap kinerja UMKM.

Teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, insentif pajak merupakan bentuk imbalan dari pemerintah kepada pelaku usaha yang menjalankan tanggung jawab sosialnya, seperti menciptakan lapangan kerja atau berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Penerimaan insentif ini, jika dikelola secara tepat oleh SDM yang kompeten, akan menghasilkan nilai tambah yang bukan hanya meningkatkan kinerja usaha, tetapi juga memperkuat hubungan perusahaan dengan para stakeholder.

Secara logika, insentif pajak hanya akan berdampak positif terhadap kinerja UMKM apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang memahami mekanisme perpajakan, memiliki literasi keuangan yang baik, dan mampu menyusun strategi pengelolaan dana secara efisien. SDM yang terlatih akan lebih cermat dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pajak, memahami regulasi yang berlaku, serta mampu menggunakan insentif pajak untuk mengurangi beban biaya dan mengalokasikan lebih banyak dana pada aktivitas produktif seperti pengembangan produk, pemasaran, atau investasi. Oleh karena itu, kualitas SDM memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis keenam sebagai berikut :

H6 : Sumber daya manusia memperkuat pengaruh antara insentif pajak terhadap kinerja UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul. Tujuan utama penelitian adalah untuk menguji pengaruh pemahaman terhadap SAK EMKM, digitalisasi bisnis, dan insentif pajak terhadap kinerja UMKM, serta peran moderasi kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hubungan tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di Kabupaten Bantul, dengan jumlah populasi sebanyak 92.825 unit usaha.

Berikut data pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 :

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan UMKM Bantul

No	Tahun	Jumlah			Jumlah UMKM
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1.	2019	29.098	11.992	7.058	48.148
2.	2020	30.486	12.201	7.114	49.801
3.	2021	86.361	-	-	86.361
4.	2022	85.099	1.674	60	86.833
5.	2023	91.080	1.683	62	92.825

Sumber : DKUKMPP Kabupaten Bantul, 2024

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 110 responden, dihitung dengan rumus Slovin pada tingkat toleransi kesalahan 10%. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = 92.825 / (1 + (92.825 (0,1)^2))$$

$$n = 92.825 / (1 + (92.825 x 0,01))$$

$$n = 92.825 / (1 + 928,25)$$

$$n = 92.825 / 929,25$$

$$n = 99,89 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5, yang terdiri dari lima variabel: pemahaman SAK EMKM, digitalisasi bisnis, insentif pajak, kualitas SDM (moderator), dan kinerja UMKM (variabel dependen). Validitas dan reliabilitas instrumen telah diuji melalui pilot test kepada 30 responden, menunjukkan seluruh indikator valid ($r > 0,361$) dan reliabel (Cronbach's Alpha $> 0,7$).

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara itu, Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menguji efek interaksi antara masing-masing variabel independen dan variabel moderasi terhadap kinerja UMKM. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan Uji validitas seluruh variabel dalam penelitian ini dapat diketahui besarnya koefisien korelasi diatas dari seluruh butir pernyataan memiliki nilai $r_{(hitung)} > r_{(tabel)}$ (0,278) dimana $r_{(tabel)}$ didapat dari tabel r product moment dengan melihat

ketentuan $N=108$ ($N-2$) dan taraf signifikansi 1%, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan variabel X_1 , X_2 , X_3 , Y dan Z dinyatakan valid. Berarti instrument tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen mampu menghasilkan data yang konsisten ketika digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama. Instrumen dikatakan andal apabila memiliki nilai koefisien Cronbach's Alpha lebih dari 0,70, yang menunjukkan bahwa reliabilitasnya berada dalam kategori baik. Uji ini digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari kuesioner, di mana setiap item merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk tertentu. Sebuah kuesioner dianggap reliabel apabila jawaban yang diberikan oleh responden menunjukkan konsistensi atau stabilitas dari waktu ke waktu. Dengan demikian, suatu variabel dinyatakan reliabel apabila menghasilkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,7

Berdasarkan uji reliabilitas mempunyai nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 , X_2 , X_3 , Y dan Z dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Pengujian ini penting dilakukan karena validitas dari uji t dan uji F dalam regresi bergantung pada asumsi bahwa residual mengikuti distribusi normal. Tingkat signifikansi (α/α) yang digunakan sebagai batas acuan biasanya ditetapkan sebesar 0,05. Apabila hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai signifikansi $0,066 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal merupakan syarat pertama dalam uji asumsi klasik karena ketika sebaran data yang dimiliki berdistribusi normal maka dapat dipastikan tidak ada data outlier/ekstrem (nilai yang berbeda dari nilai observasi) sehingga menghindari hasil analisis yang bias dan memberikan hasil regresi yang valid.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian uji multikolonieritas, pada variabel bebas yaitu memiliki nilai tolerance $> 0,10$ sedangkan nilai VIF keduanya juga < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi ini. Tujuan uji ini untuk menghindari adanya korelasi atau hubungan antara variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Z karena variabel tersebut merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Apabila terjadi multikolonieritas maka nilai koefisien beta dari variabel bebas dapat berubah secara drastis ketika ada penambahan atau pengurangan variabel bebas dalam model ini dan berdampak juga pada nilai signifikansi yang tidak valid.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan varian residual antar pengamatan dalam suatu model regresi. Ketidaksamaan ini, jika ada, dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak valid. Apabila nilai signifikansi dari uji ini lebih besar dari 0,05 (di atas tingkat kepercayaan 5%), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji, jika diperoleh nilai signifikansi $> 0,05$, maka model dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas. Data yang bersifat homoskedastis menunjukkan bahwa varian residual konsisten,

sehingga hasil uji t dan uji F menjadi lebih dapat diandalkan dan tidak bias.

Uji F

Uji statistik F digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independent secara serempak terhadap variabel dependen. Nilai F hitung diperoleh sebesar 61,253, sedangkan F tabel berdasarkan distribusi F dengan $df_1 = 3$ (jumlah variabel independen) dan $df_2 = 106$ ($N - \text{jumlah variabel independen} - 1 = 110 - 3 - 1$) pada taraf signifikansi 5% adalah 2,68. Karena F hitung ($61,253$) $>$ F tabel ($2,68$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa **terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel SAK EMKM (X1), digital bisnis (X2), dan insentif pajak (X3) terhadap kinerja UMKM (Y)**. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama.

Uji Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu penerapan SAK EMKM (X1), digital bisnis (X2), dan insentif pajak (X3) terhadap kinerja UMKM (Y). Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 61,253 dengan signifikansi 0,000, yang berarti model regresi secara simultan signifikan dalam menjelaskan kinerja UMKM.

Hasil uji t menunjukkan:

- X1 (SAK EMKM): Koefisien regresi $-0,490$, t hitung $-12,102$, sig. $0,000$. Artinya, SAK EMKM berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja UMKM.
- X2 (Digital Bisnis): Koefisien regresi $-0,058$, t hitung $-3,108$, sig. $0,002$. Artinya, digital bisnis juga berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja UMKM.
- X3 (Insentif Pajak): Koefisien regresi $0,235$, t hitung $3,143$, sig. $0,002$. Artinya, insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja UMKM.

Koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar $0,624$ menunjukkan bahwa $62,4\%$ variasi dalam kinerja UMKM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur berapa persen kemampuan regresi dalam memaparkan variasi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. R-Squared, yang berkisar dari 0 hingga 1, menggambarkan seberapa baik variabel independen (X) dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen (Y).

Berdasarkan hasil uji yang terdapat pada Tabel 4.14, diperoleh nilai R^2 sebesar $0,634$. Artinya, $63,4\%$ variasi dalam kinerja UMKM dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model ini, yaitu Insentif Pajak, Digital Bisnis, dan SAK EMKM. Sisa $36,6\%$ variasi kinerja UMKM dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Adapun nilai Adjusted R^2 sebesar $0,624$ menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model, model regresi ini dapat menjelaskan variasi kinerja UMKM dengan cukup baik. Nilai Adjusted R^2 ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan nilai R^2 karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model, yang memberikan gambaran lebih realistis tentang seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki daya jelaskan yang cukup tinggi terhadap kinerja UMKM, meskipun masih ada faktor-faktor lain di luar model yang turut mempengaruhi kinerja UMKM.

Uji Moderasi (MRA)

Variabel kualitas SDM (Z) digunakan sebagai moderator. Hasil pengujian interaksi menunjukkan bahwa ketiga interaksi X1Z, X2Z, dan X3Z memiliki signifikansi 0,000 dengan koefisien regresi 0,029, yang berarti kualitas SDM secara signifikan memperkuat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap kinerja UMKM.

Berdasarkan hasil olah data menggunakan analisis regresi linear berganda, ditemukan bahwa pemahaman terhadap SAK EMKM berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi -0,490. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara penerapan SAK EMKM terhadap kinerja UMKM. Dalam konteks teori stakeholder, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah sebagai salah satu stakeholder telah menyediakan panduan akuntansi yang sederhana melalui SAK EMKM, pelaku UMKM belum mampu mengimplementasikannya dengan optimal akibat rendahnya literasi akuntansi. Ketidaksiapan internal, terutama dalam hal sumber daya manusia, menyebabkan standar akuntansi tersebut menjadi beban administratif daripada alat bantu peningkatan kinerja.

Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan bahwa digital business juga berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja UMKM, dengan nilai signifikansi 0,002 dan koefisien -0,058. Hasil ini juga bertolak belakang dengan hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa digital business berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi digital oleh UMKM belum dilakukan secara efektif, dan bahkan dapat menciptakan beban tambahan jika tidak disertai dengan pelatihan yang memadai. Berdasarkan teori stakeholder, kegagalan UMKM dalam memanfaatkan digitalisasi mencerminkan ketidaksesuaian antara ekspektasi stakeholder eksternal (seperti konsumen digital dan pemerintah) dan kemampuan aktual pelaku usaha dalam mengelola transformasi digital.

Sebaliknya, insentif pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, dengan koefisien regresi sebesar 0,235 dan nilai signifikansi 0,002. Hasil ini sejalan dengan hipotesis ketiga (H3), yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM. Temuan ini mendukung teori stakeholder, di mana dukungan pemerintah dalam bentuk keringanan pajak berperan langsung dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM yang mampu memahami dan memanfaatkan kebijakan insentif pajak dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk pengembangan bisnis.

Lebih lanjut, uji interaksi menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) secara signifikan memoderasi hubungan antara ketiga variabel independen (SAK EMKM, digital business, dan insentif pajak) terhadap kinerja UMKM. Hal ini mendukung hipotesis keempat (H4), kelima (H5), dan keenam (H6), yang menyatakan bahwa SDM mampu memperkuat pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja. Kualitas SDM yang tinggi memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami, mengelola, dan mengimplementasikan praktik akuntansi, teknologi digital, dan perpajakan secara efektif. Secara teoritis, temuan ini memperkuat asumsi dalam teori stakeholder bahwa respons kinerja organisasi terhadap kebijakan atau tekanan stakeholder sangat tergantung pada kapasitas internal, dalam hal ini sumber daya manusia yang memadai.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan eksternal sangat bergantung pada kesiapan internal pelaku usaha. Kualitas SDM menjadi variabel kunci yang menentukan sejauh mana kebijakan seperti SAK EMKM,

digitalisasi, dan insentif pajak dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja nyata bagi UMKM.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemahaman terhadap SAK EMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan standar akuntansi tersebut secara efektif, kemungkinan karena kurangnya pelatihan dan pemahaman akuntansi.
2. Digital business juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Meskipun digitalisasi merupakan langkah modernisasi, banyak UMKM yang belum siap dari segi infrastruktur dan kompetensi digital, sehingga penerapannya justru menjadi beban tambahan.
3. Insentif pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Kebijakan ini membantu meringankan beban usaha, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih optimal.
4. Kualitas sumber daya manusia (SDM) terbukti sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara ketiga variabel independen (SAK EMKM, digital business, dan insentif pajak) terhadap kinerja keuangan UMKM. SDM yang kompeten mampu meningkatkan kemampuan adaptasi dan efektivitas dalam menjalankan usaha.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada para pelaku UMKM. Pertama, disarankan agar pelaku usaha meningkatkan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) guna menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya, sehingga mempermudah akses terhadap pendanaan maupun investor. Kedua, penggunaan teknologi digital, seperti platform marketplace dan media sosial, perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran serta efisiensi operasional usaha. Ketiga, pelaku UMKM diharapkan memahami kebijakan perpajakan, terutama terkait insentif yang diberikan oleh pemerintah, sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan dan upaya untuk menekan beban pajak. Terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek penting yang perlu terus dilakukan melalui pelatihan di bidang manajemen bisnis, digitalisasi, dan akuntansi guna memperkuat daya saing di tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif.

Sementara itu, saran untuk pemerintah dan lembaga terkait antara lain adalah perlunya peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi mengenai SAK EMKM agar lebih banyak pelaku UMKM yang memahami dan mampu menerapkannya secara tepat. Pemerintah juga diharapkan dapat mendorong digitalisasi UMKM melalui pemberian insentif atau subsidi, misalnya dalam bentuk dukungan akses ke platform digital atau pelatihan pemasaran online. Selain itu, kebijakan insentif pajak perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tepat sasaran, mudah diakses, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar jumlah sampel diperluas dan cakupan wilayah diperbesar agar hasil yang diperoleh lebih representatif terhadap kondisi UMKM secara umum. Peneliti juga dianjurkan menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan kuantitatif dan kualitatif, agar dapat menggali lebih dalam pengalaman dan tantangan yang dihadapi UMKM. Selain itu, variabel-variabel tambahan seperti akses permodalan, dukungan regulasi pemerintah, dan inovasi

produk dapat dijadikan fokus agar penelitian ke depan lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan kebijakan maupun praktik usaha.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi, perpajakan, dan manajemen UMKM. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori stakeholder dengan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan akuntansi (SAK EMKM), pemanfaatan teknologi digital, dan kebijakan insentif pajak berperan signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM, khususnya ketika dimoderasi oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Hasil penelitian ini juga memperkaya kajian akademik dengan menambahkan perspektif lokal dari pelaku UMKM di Kabupaten Bantul yang selama ini masih minim dijadikan objek penelitian.

Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, dinas koperasi, dan lembaga pembina UMKM dalam merancang program pelatihan dan sosialisasi yang lebih terarah, seperti pelatihan pembuatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, literasi digital, serta edukasi pemanfaatan insentif pajak. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan mendorong peningkatan kapasitas manajerial dan keuangan sehingga mampu bersaing secara lebih adaptif dan berkelanjutan di era digital.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasilnya. Pertama, penelitian ini terbatas pada UMKM yang berada di Kabupaten Bantul sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk UMKM di wilayah lain yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan regulasi yang berbeda. Kedua, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan instrumen kuesioner tertutup, sehingga tidak dapat menggali lebih dalam aspek kualitatif seperti pengalaman subjektif, tantangan riil di lapangan, atau persepsi pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM, digitalisasi, dan kebijakan insentif pajak. Ketiga, penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel utama, yaitu SAK EMKM, digital business, dan insentif pajak, padahal terdapat faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi kinerja UMKM seperti dukungan pemerintah, akses terhadap permodalan, serta kapasitas inovasi produk. Terakhir, jumlah responden dalam penelitian ini hanya melibatkan 110 pelaku UMKM, yang meskipun telah dihitung secara proporsional, tetap memiliki keterbatasan dalam mewakili keseluruhan populasi UMKM di Kabupaten Bantul secara menyeluruh.

IMPLIKASI

Dari temuan ini menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi pelaku UMKM dalam hal pencatatan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta pemahaman kebijakan pajak. Pemerintah daerah dan lembaga pendamping usaha diharapkan memperluas program pembinaan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam membangun kapasitas usaha yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G., Putu, A. Y. U., Sukaningrat, N., Akuntansi, J., & Bali, P. N. (2023). *Pengaruh Pemberian Insentif Pph Final*.
- Ani, J., Lumanauw, B., & Tampenawas, J. L. A. (2021). Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado the Influence of Brand Image, Promotion

- and Service Quality on Consumer Purchase Decisions on Tokopedia E-Commerce in Manado. *663 Jurnal EMBA*, 9(2), 663–674.
- Armiani, A., Basuki, B., & Suwarno, N. (2021). Teknologi Digital Memediasi Dampak Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Umkm Di Nusa Tenggara Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 5(3), 300–320. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i3.4892>
- Aryani, M. (2021). Analisis Digital Marketing Pada Hotel Kila Di Kabupaten Lombok Barat Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.33394/vis.v6i1.4085>
- Ausat, A. M. A., Astuti, E. S., & Wilopo. (2022). Analysis Of Factors That Influence On E-Commerce Adoption And Their Impacts For Sme Performance In Subang District. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(2), 333–346. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202295422>
- Ayem, S., Shalsya, P., & Nasir, B. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi , E-Commerce , Insentif Pajak , dan Bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja UMKM. *Journal on Education*, 06(03), 17611–17618.
- Ayem, S., & Wahidah, U. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan UMKM Di Kota Yogyakarta. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.35914/jemma.v4i1.437>
- Daud, I., Nurjannah, D., Mohyi, A., Ambarwati, T., Cahyono, Y., Haryoko, A. D. E., Handoko, A. L., Putra, R. S., Wijoyo, H., Ari-Yanto, A., & Jihadi, M. (2022). The effect of digital marketing, digital finance and digital payment on finance performance of indonesian smes. *International Journal of Data and Network Science*, 6(1), 37–44. <https://doi.org/10.5267/J.IJDNS.2021.10.006>
- Eka Aprilia. (2021). PENGARUH INSENTIF PAJAK, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN KEPUASAN PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SIDOARJO. *Repositori Universitas Hayam Wuruk Perbanas*, 3(2), 6. http://eprints.perbanas.ac.id/7799/8/ARTIKEL_ILMIAH.pdf
- Essiet, V. E., & Paago, L. (Ph. D. (2024). Tax Incentives and Financial Performance of Small and Medium Enterprises in Rivers State. *BW Academic Journal*, 11(1), 3088–4390. <https://bwjournal.org/index.php/bsjournal/article/view/1872>
- Frans Sudirjo, Arief Yanto Rukmana, Hilarius Wandan, & Muhammad Lukman Hakim. (2023). Pengaruh Kapabilitas Pemasaran, Digital Marketing Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM Di Jawa Barat. *Jurnal Bisnisan : Riset Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 55–69. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v5i1.134>
- Harimurti, F. (2024). *Tax Incentives and Business Performance : Impact on Sustainability of MSMEs in Surakarta City*. 3(2), 1423–1433. <https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.1187>
- Hermawan, F., Detra, A. E., Eldrian, A. F., Ekonomi Dan Bisnis, F., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). Pengaruh Media Digital Sebagai Sarana Promosi Dan Transaksi Bagi Pelaku UMKM Makanan Dan Minuman Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(2), 493–505. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i2.797>
- Kakilo, R., Hinelu, R., & Podungge, R. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Kota Gorontalo. *YUME : Journal of Management*, 5(3), 358–366. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.347>

- Kholifah, D. (2023). *Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas*. 3(1), 70–78.
- Kumala, D. (2024). *Digital Transformation and Efficiency of Sharia-Based HR Management on MSME Performance with Organizational Culture Moderation : A Quantitative Study in Cileungsi*. 3(2), 1154–1161. <https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.1026>
- Little, P., Gould, C., Dunleavey, J., Williamson, I., Moore, M., Warner, G., Mar, C. Del, & Doust, J. (2002). Primary care. *Bmj*, 325(7354), 22. <https://doi.org/10.1136/bmj.325.7354.22>
- Meiriasari, V., Ratu, M. K., & Putri, A. U. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Insentif Pajak Bagi Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 310. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6437>
- Muttalib, A. (2022). PENGARUH DIGITAL MARKETING TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI NUSA TENGGARA BARAT (Studi Kasus Program Active Selling 2021 KOMINFO). *Econetica*, 4(2).
- Nabawi, N., & Basuki, B. (2022). Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Modal Usaha Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Usaha Umkm. *AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 111–120. <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i1.6837>
- Oktayani, K. S., Gede, L., & Dewi, K. (2024). *Pengaruh Akses Keuangan , Modal Keuangan , Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng*. 15(1), 433–447.
- Padli. (2022). Pengaruh Digital Marketing Terhadap Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Usaha Mikro. *Jurnal Hipotesa*, 16(2), 21–35.
- Pangestuti, D. F. R., & Zahiroh, M. Y. (2024). Tax Incentives Pathfinder under COVID-19. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 11(2), 167–192. <https://doi.org/10.12928/jreksa.v11i2.10615>
- Rahadhini, M. D. (2021). The Effect of Digital Marketing and Financial Inclusion on Business Sustainability through Marketing Performance Culinary Msme's in Surakarta. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 04(06), 716–723. <https://doi.org/10.47191/jefms/v4-i6-06>
- Riski M, A., H, R., Fithrayudi Triatmaja, M., & Riswan, R. (2023). Pengaruh Financial Technology, E-Commerce, Literasi Keuangan Dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Umkm Di Kabupaten Batang Dengan Pengetahuan Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *Neraca*, 19(2), 29–47. <https://doi.org/10.48144/neraca.v19i2.1684>
- Rita, M. R., & Nastiti, P. K. Y. (2024). The influence of financial bootstrapping and digital transformation on financial performance: evidence from MSMEs in the culinary sector in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2363415>
- Rizky, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi SAK EMKM, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja terhadap Implementasi SAK EMKM di Kota Tangerang Selatan. *Skripsi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1–94.
- Sabihaini, S., Astuti, S., Permana, R. I., & Marita, M. (2021). Influence of Digital Marketing, Knowledge of Information Technology On the Financial Performance of Small and Medium Enterprises (SMEs). *RSF Conference Series: Business*,

- Management and Social Sciences*, 1(3), 172–178.
<https://doi.org/10.31098/bmss.v1i3.316>
- Setiawan, A., Sari, W., Afif, A., Yahya, R. F., & Mayasafitri, R. (2024). Implementation of SAK E-MKM: Key Factor in Improving MSME Performance. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 183–194. <https://doi.org/10.28932/jam.v16i1.8239>
- Setyaningrum, R. P., Rulianti, E., & Susilo, P. (2024). Digitalisation Empowerment of Business To Digital Innovation in the Achievement of Sdgs: a Survey on Creative Msme Actors in Indonesia. *Journal of Lifestyle and SDG'S Review*, 5(1), 1–23. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe02770>
- Umar, F., Septian, M. R. A., & Pertiwi, D. A. A. (2023). Effect of Digitalization on Business Performance in the MSME Industry Context. *Journal of Information System Exploration and Research*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.52465/joiser.v2i1.199>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.*
- Wang, G., Mansor, Z. D., & Leong, Y. C. (2024). Unlocking digital performance: exploring the mediating role of employee competitive attitudes, behaviors, and dynamic capabilities in Chinese SMEs under high-involvement human resource management practice. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-024-00395-3>
- Yolanda, N., Izzati, D., Zahrani, V. A., Delani, M., & Aliah, N. (2024). *Literature Study on the Application of Financial Accounting Standarts for Micro , Small and Madium-Sized Entities (Sak EMKM) to Assess the Fairness of UMKM Financial Statements.* 2(2), 1–12.
- Yuli Agustina, Rahman, A., & Filianti, F. (2021). Insentif Pajak: Solusi Tepat bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 149–155. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2618>